



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

PENCEGAHAN *FRAUD* DI ERA DIGITAL

Dwiky Subekti Rachman ¹, dan Sarwendah Biduri ²

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia, email: dwikyachman49@gmail.com

² Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia, email: sarwendahbiduri@umsida.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Whistleblowing System, Good Governance, dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud di Era Digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan pendistribusian kuesioner kepada Pegawai Negeri Sipil di UPT. Sampel penelitian terdiri dari 40 responden yang dipilih menggunakan teknik Sampling Jenuh, sehingga mewakili seluruh populasi. Analisis data dalam penelitian ini mencakup uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linier berganda. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan perangkat statistik SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sebagian (1) Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki dampak positif terhadap pencegahan Fraud di Era Digital, (2) Whistleblowing System tidak memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan Fraud di Era Digital, (3) Good Governance memiliki dampak positif terhadap pencegahan Fraud di Era Digital, dan (4) Pengendalian Internal System tidak memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan Fraud di Era Digital.

Kata kunci: Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Whistleblowing System, Good Governance, Pengendalian Intern, Pencegahan Fraud, Era Digital

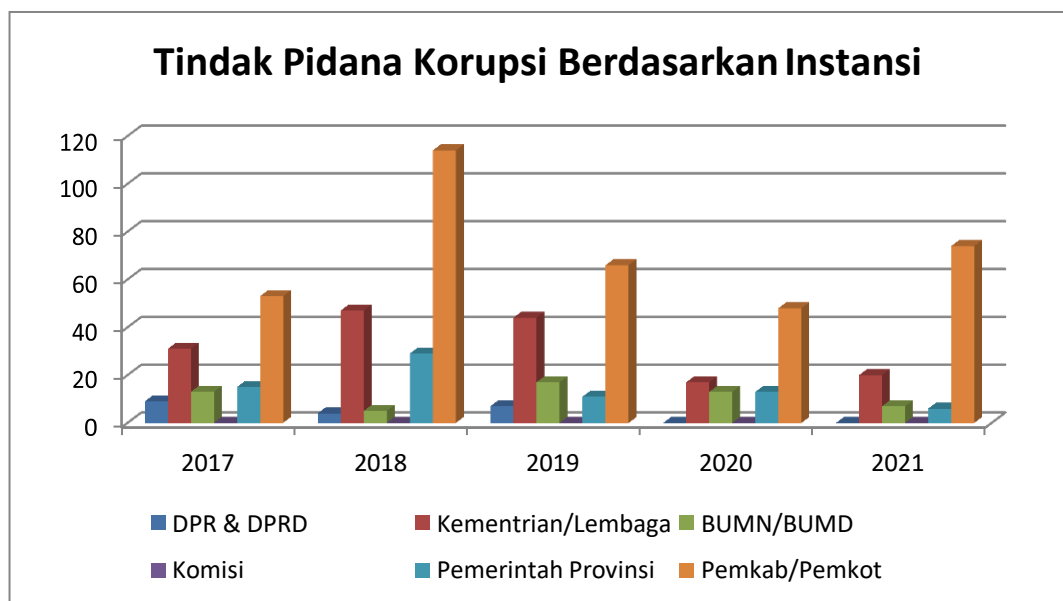
Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Whistleblowing System, Good Governance, dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud di Era Digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan pendistribusian kuesioner kepada Pegawai Negeri Sipil di UPT. Sampel penelitian terdiri dari 40 responden yang dipilih menggunakan teknik Sampling Jenuh, sehingga mewakili seluruh populasi. Analisis data dalam penelitian ini mencakup uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linier berganda. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan perangkat statistik SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sebagian (1) Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki dampak positif terhadap pencegahan Fraud di Era Digital, (2) Whistleblowing System tidak memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan Fraud di Era Digital, (3) Good Governance memiliki dampak positif terhadap pencegahan Fraud di Era Digital, dan (4) Pengendalian Internal System tidak memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan Fraud di Era Digital.

Keywords: Public Sector Accounting Implementation, Whistleblowing System, Good Governance, Internal Control, Fraud Prevention, Digital Era

1. PENDAHULUAN

Kecanggihan teknologi yang semakin tahun semakin meningkat berdampak besar dan berpengaruh bagi semua aspek kehidupan sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi saat ini ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang muncul ini dapat mendorong dalam peningkatan mempermudah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia serta dampak negatif yang ditimbulkan adanya bentuk penyalahgunaan dalam teknologi untuk kepentingan pribadi dan merugikan kepada pihak lain. Dari kedua dampak teknologi tersebut mengharuskan adanya perubahan dari sisi pola penggunaan terhadap teknologi yang berdasarkan pertimbangan yang bijak untuk meyakinkan bahwa kemajuan dalam teknologi ini menjadi perangkat yang dapat mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya [1]. Dampak yang diinginkan dari kemajuan teknologi pada akuntansi sektor publik merupakan adanya kemudahan dan kecepatan berbagai praktik akuntansi dapat diimplementasikan dan semakin banyak informasi detail tentang proses yang dapat diperoleh. Pada sisi lain, hal tersebut hanya mampu dicapai apabila pengguna yang berada di dalam proses akuntansi dapat memanfaatkan produk teknologi dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan tujuan positifnya yaitu dengan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada publik. Kemampuan positif dan tujuan pemanfaatan teknologi dalam proses akuntansi meningkatkan pada efektif dan efisien yang lebih besar [2].



Gambar 1
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi

Sumber: Kompasiana.com

Beberapa kasus yang terjadi di berbagai bidang terkait korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, ketidakpatuhan, dan berbagai macam tindak pidana lainnya. Hal ini disebabkan kurangnya pengendalian intern pemerintah daerah yang menjadi salah satu penyebab inefisiensi dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang telah mencapai level digital saat ini, keterampilan individu yang menggunakan produk teknologi digital dapat menjadi pendorong yang kuat dari penipuan. Selain itu, ketidakmerataan aplikasi teknologi digital yang disebabkan karena pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan teknologi yang belum dimiliki oleh semua perusahaan, termasuk sektor publik dan pemerintahan, menghadirkan tingginya peluang yang menyebabkan terjadinya *fraud* atau kecurangan. *Fraud* berdasarkan garis besar bisa dikelompokkan dalam tiga jenis tindakan, yakni penyalahgunaan aset, pernyataan palsu dalam laporan keuangan, dan korupsi [3].

Manfaat dan kontribusi dari penelitian ini adalah untuk (1) mengevaluasi dampak penerapan akuntansi sektor publik, *whistleblowing system*, *good governance*, dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di era digital, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan di era digital seperti penerapan akuntansi sektor publik dan tata kelola yang baik, (3) menyoroti pentingnya sistem dan mekanisme yang efektif dalam mencegah kecurangan, termasuk peran manajemen dan dewan komisaris dalam pengambilan keputusan, (4) memberikan wawasan bagi organisasi khususnya UPT, pengawasan dan sertifikasi hasil pertanian, untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) untuk mencegah penipuan di era digital.

2. LITERATUR REVIEW

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan proses pencatatan, pengelompokan, penganalisisan, dan proses melaporkan transaksi keuangan dari suatu organisasi yang menyediakan informasi keuangan bagi para pengguna laporan keuangan yang berfungsi untuk pengambilan keputusan yang diimplementasikan dalam proses mengelola dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dinaunginya juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dari swasta [4]. Akuntansi sektor publik menangani tiga topik utama, yakni penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntan publik merupakan media informasi baik untuk administrasi yang berfungsi sebagai alat kontrol maupun sebagai media informasi untuk publik. Bagi pemerintah, Informasi akuntansi digunakan dalam proses mengendalikan suatu manajemen yang dimulai dengan perencanaan strategis, pemrograman, penganggaran, pengevaluasian kinerja, dan pelaporan kinerja.

2.2 Whistleblowing System

Whistleblowing, pengertian *whistleblowing* merupakan suatu tindak pengungkapan yang dilakukan pegawai tentang suatu informasi yang teridentifikasi sebagai pelanggaran hukum, norma, peraturan yang berlaku, pedoman, prinsip atau profesionalitas bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki kaitan dengan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang atau membahayakan kepentingan publik. Penyebab adanya *Whistleblowing* disebabkan oleh terjadinya konflik antara loyalitas pegawai dan perlindungan kepentingan public [5].

2.3 Good Governance

Good Corporate Governance secara akurat merupakan Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk membuat nilai tambah (*value added*) bagi semua stakeholder [6]. Terdapat lima aspek dalam prinsip-prinsip GCG, yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran dan Kesetaraan.

2.4 Pengendalian Intern

Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang dioperasikan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang di desain guna memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tiga golongan tujuan berikut: (a) Keandalan pelaporan keuangan (b) Efektivitas dan keefisienan operasi, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku [7].

2.5 Pencegahan *Fraud*

Pencegahan kecurangan pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manajemen dalam hal memutuskan kebijakan, sistem serta mekanisme guna membantu menegaskan bahwa sikap yang dibutuhkan telah dilakukan dewan komisaris, manajemen, serta anggota lain perusahaan untuk mampu memberikan kepercayaan yang baik dalam menggapai tiga tujuan utama yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas serta efisiensi operasi dan ketaatan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku [7].

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan aplikasi IBM SPSS v26. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai negeri sipil di UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian. Sampel diambil dengan menggunakan metode *Sampling Jenuh*. *Sampling Jenuh* ini ialah salah satu Teknik penentuan sampling yang disebutkan apabila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Jumlah responden 40 responden yang berasal dari pegawai negeri sipil UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian. Sedangkan untuk metode pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner yang berisi beberapa item pernyataan.

4. HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu pernyataan pada kuesioner yang dibagikan. Dapat dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel atau dengan tingkat signifikan $<$ 0,05.

Uji Validitas Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Berdasarkan Tabel 1, hasil perhitungan uji validitas terhadap kuesioner variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik menunjukkan bahwa seluruh butir dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal tersebut disebabkan r hitung lebih besar dengan r tabel (0,329) atau tingkat signifikan kurang dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan valid dan dapat diteruskan pada uji selanjutnya.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig. 2 (Tailed)	Keterangan
PAPS 1	0,843	0,000	Valid
PAPS 2	0,746	0,000	Valid
PAPS 3	0,764	0,000	Valid
PAPS 4	0,783	0,000	Valid
PAPS 5	0,638	0,000	Valid
PAPS 6	0,768	0,000	Valid
PAPS 7	0,773	0,000	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS v26, 202

Uji Validitas Variabel Whistleblowing System

Berdasarkan Tabel 2 hasil perhitungan uji validitas terhadap kuesioner variabel *Whistleblowing System* menunjukkan bahwa terdapat 5 butir dalam kuesioner dinyatakan valid dan 1 butir dinyatakan tidak valid. Hal tersebut disebabkan 5 butir memiliki r hitung lebih besar dengan r tabel (0,329) sedangkan 1 butir memiliki r hitung lebih kecil dengan r tabel (0,329) atau tingkat signifikan 5 butir pernyataan kuesioner kurang dari 0,05 sedangkan 1 butir memiliki tingkat signifikan lebih dari 0,05. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dinyatakan terdapat 5 butir pernyataan valid dan 1 butir pernyataan tidak valid.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel Whistleblowing System

Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig.2 (Tailed)	Keterangan
WS 1	0,694	0,000	Valid
WS 2	0,795	0,000	Valid
WS 3	0,774	0,000	Valid
WS 4	0,726	0,000	Valid
WS 5	0,726	0,000	Valid
WS 6	0,172	0,288	Tidak Valid

Sumber : Data Diolah SPSS v26, 2022

Uji Validitas Variabel *Good Governance*

Berdasarkan Tabel 3 hasil perhitungan uji validitas terhadap kuesioner variabel *Good Governance* menunjukkan bahwa seluruh butir dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal tersebut disebabkan r hitung lebih besar dengan r tabel (0,329) atau tingkat signifikan kurang dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan valid dan dapat diteruskan pada uji selanjutnya.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel *Good Governance*

Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. 2 (Tailed)	Keterangan
GG 1	0,687	0,000	Valid
GG 2	0,500	0,001	Valid
GG 3	0,566	0,000	Valid
GG 4	0,512	0,001	Valid
GG 5	0,724	0,000	Valid
GG 6	0,677	0,000	Valid
GG 7	0,604	0,000	Valid
GG 8	0,643	0,000	Valid
GG 9	0,684	0,000	Valid
GG 10	0,749	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah SPSSv26, 2022

Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern

Berdasarkan Tabel 4, hasil perhitungan uji validitas terhadap kuesioner variabel Pengendalian Intern menunjukkan bahwa seluruh butir dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal tersebut disebabkan r hitung lebih besar dengan r tabel (0,329) atau tingkat signifikan kurang dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan pada uji selanjutnya.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern

Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig.2 (Tailed)	Keterangan
PI 1	0,627	0,000	Valid
PI 2	0,845	0,000	Valid
PI 3	0,753	0,000	Valid
PI 4	0,693	0,000	Valid
PI 5	0,799	0,000	Valid
PI 6	0,657	0,000	Valid
PI 7	0,753	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS v26, 2022

Uji Validitas Variabel Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan Tabel 5 hasil perhitungan uji validitas terhadap kuesioner variabel Pencegahan *Fraud* menunjukkan bahwa seluruh butir dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal tersebut disebabkan r hitung lebih besar dengan r tabel (0,329) atau tingkat signifikan kurang dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan pada uji selanjutnya.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Pencegahan *Fraud*

Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig.2 (Tailed)	Keterangan
PF 1	0,690	0,000	Valid
PF 2	0,762	0,000	Valid
PF 3	0,666	0,000	Valid

PF 4	0,728	0,000	Valid
------	-------	-------	-------

Sumber: Data Diolah SPSS v26, 2022

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk menilai dan menguji konsistensi dari jawaban responden terhadap pernyataan yang ada di dalam kuesioner. Penelitian menganalisis data menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Data yang diolah dapat dikatakan reliabel dengan syarat apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6.

Uji Reliabilitas Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Berdasarkan Tabel 6, hasil bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki nilai 0,875. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan yang ada di dalam kuesioner adalah reliabel sebab nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6.

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,875	0,878	7

Sumber: Data Diolah SPSS v26, 2022

Uji Reliabilitas Variabel Whistleblowing System

Berdasarkan Tabel 7, bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel *Whistleblowing System* memiliki nilai 0,811 dengan jumlah butir pernyataan sebanyak 5 butir. Hal ini disebabkan oleh 1 pernyataan tidak dipergunakan pada uji reliabilitas yaitu butir WS6 yang dinyatakan tidak valid dalam uji validitas. Sehingga dari hasil tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa 5 butir pernyataan yang terdapat dalam kuesioner adalah *reliabel* sebab nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6.

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Whistleblowing System
Reliability Statistic

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,811	0,815	5

Sumber: Data Diolah SPSS v26, 2022

Uji Reliabilitas Variabel Good Governance

Berdasarkan Tabel 8 , bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel *Good Governance* memiliki nilai 0,836. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang ada di kuesioner dapat dikatakan reliabel oleh karena *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6.

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas Variabel God Governance
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,836	0,836	7

Cronbach's Alpha	Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,811	0,815	5

Sumber: Data Diolah SPSS v26, 2022

Uji Reliabilitas Variabel Pengendalian Intern

Berdasarkan tabel 9, bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel Pengendalian Intern memiliki nilai 0,855. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang ada dikuisitioner dapat dikatakan reliabel oleh karena *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6.

Tabel 9
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengendalian Intern
Reliability Statistic

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,855	0,856	7

Sumber: Data Diolah SPSS v26, 2022

Uji Reliabilitas Variabel Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan tabel 10 bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel Pencegahan *Fraud* memiliki nilai 0,675. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang ada dikuisitioner dapat dikatakan reliabel oleh karena *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6.

Tabel 10
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengendalian Intern
Reliability Statistic

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,675	0,675	4

Sumber: Data Diolah SPSS v26, 2022

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 11
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,682	2,945		0,231	0,818
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)	-0,313	0,060	-0,578	-5,238	0,000

Whistleblowing System (X2)	0,117	0,109	0,140	1,075	0,290
Good Governance (X3)	0,340	0,101	0,591	3,362	0,002
Pengendalian Intern (X4)	0,070	0,124	0,092	0,567	0,574

A. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)

Sumber: Data Diolah SPSS v26. 2022

5. PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasar dari hasil pengujian t yang telah disajikan diatas dapat diketahui bahwa variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik mempunyai angka signifikan lebih kecil dari Alpha 0,05 yaitu 0,000 dan koefisien regresi 0,313. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*. Hasil Penelitian ini dapat membuktikan bahwa UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian telah menerapkan Akuntansi Sektor Publik dengan baik sehingga *Fraud* dapat dicegah dalam instansi tersebut. Penerapan Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme akuntansi yang diberlakukan dalam praktik organisasi publik dengan dasar praktik akuntansi yang sama pada umumnya terbatas pada pemangku kepentingannya saja. Dengan demikian, semakin baik Penerapan Akuntansi Sektor Publik, maka akan semakin baik pencegahan *fraud* di era digital saat ini. Penelitian ini mendukung penelitian [8] terkait Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah *Fraud* Pada Sektor Publik di Era Digital. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik dapat mencegah terjadinya *fraud* pada sektor publik di era digital.

Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan dari hasil pengujian uji t yang tercantum pada tabel11 dapat disimpulkan bahwa variabel *whistleblowing system* memiliki nilai lebihbesar dari *alpha* 0,05 yaitu 0,290 dan koefisien regresi 0,117. Artinya *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*. Pegawai UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian yang mempunyai sikap *Whistleblowing* lebih cenderung tidak akan melakukan tindakan kecurangan dan akan melakukan pelaporan jika terdapat suatu tindak kecurangan. Dengan sikap inilah yang akan mengurangi adanya tindakan *fraud* di era digital. *Whistleblowing System* adalah suatu sistem pelaporan apabila terjadi suatu kecurangan atau tindakan yang menyimpang dari hukum yang dilakukan seseorang dalam organisasi atau lembaga tersebut, sehingga dapat merugikan organisasi atau lembaga terkait. Dengan adanya *Whistleblowing System* memberikan peluang bagi *Whistleblower* untuk melakukan pelaporan tindakan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal organisasi atau lembaga.

Penelitian ini memiliki hasil yang mendukung penelitian [9] dan [10] yang mengungkapkan bahwa *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap kecurangan, karena secara teori kecurangan salah satunya kemungkinan yang terjadi. Kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan dapat dikurangi oleh adanya pengawasan dari individu pegawai di organisasi tersebut [10]. Sehingga hasil penelitian ini *Whistleblowing System* dalam organisasi atau lembaga tidak berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* di era digital saat ini, karena setiap pegawai ada rasa diawasi oleh pegawai lain oleh sebab itu mereka enggan untuk melakukan tindakan kecurangan.

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan Tabel 11 dapat dikatakan bahwa variabel *Good Governance* mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari Alpha 0,05 yaitu 0,002 dan koefisien regresi 0,340. Artinya *Good Governance* memiliki pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*. Hasil Penelitian ini dapat membuktikan bahwa UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian telah menerapkan *Good Governance* dengan baik sehingga *Fraud* dapat dicegah dalam instansi tersebut. *Good Governance* merupakan aturan atau tata kelola yang diberlakukan dalam

organisasi atau lembaga untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi maupun lembaga tersebut. Dengan hal tersebut, semakin baik tata kelola organisasi atau lembaga maka semakin baik dalam pencegahan *fraud* di era digital saat ini. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh [11] dan [12] membuktikan bahwa *Good Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil pengujian uji t yang disajikan Tabel 11 dapat disimpulkan bahwa variabel Pengendalian Intern bernilai signifikan lebih besar dari Alpha 0,05 yaitu 0,574 dan koefisien regresi 0,070. Artinya Pengendalian Intern tidak memiliki pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*. Hasil ini disebabkan bahwa penelitian yang dilakukan dengan menggunakan variabel pengendalian Intern dengan dimensi yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang disebut Pengendalian Preventif. Pengendalian preventif ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan – penyimpangan agar sesuai dengan standar, peraturan juga kebijakan dengan melaksanakan pemantauan secara berkala. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian kurangnya dalam pengendalian detektif yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara pengendalian preventif dan detektif. Hasil penelitian ini mendukung penelitian [13] dan [14] mengungkapkan bahwa Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasar dari hasil pengujian yang sudah dilakukan maka penelitian ini memiliki kesimpulan yakni, Penerapan Akuntansi Sektor Publik memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* di era digital. Hasil tersebut membuktikan semakin baik Penerapan Akuntansi Sektor Publik, maka akan semakin baik pencegahan *fraud* di era digital saat ini. *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di era digital. Hasil tersebut menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud*. *Good Governance* memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* di era digital. Hasil tersebut menunjukkan instansi tersebut melakukan tata kelola yang baik dalam mencegah terjadinya *fraud*. Pengendalian intern tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* di era digital. Hasil tersebut menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel Pengendalian Intern terhadap pencegahan *fraud*. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, bisa ditambahkan seperti memperluas ukuran sampel dan memasukkan variabel tambahan yang mungkin mempengaruhi pencegahan penipuan di era digital.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat keterbatasan dalam penelitian, sehingga terdapat beberapa saran bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah sampel dan memperluas area penelitian.
2. Bagi Penelitian selanjutnya peneliti berharap dapat menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* di era digital.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian pada waktu saat tidak terjadinya pandemi, agar mendapatkan tingkat jawaban kuesioner lebih tinggi serta mendapatkan hasil yang lebih akurat.
4. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, sebab dengan adanya hasil penelitian tersebut maka Kepala UPT akan meningkatkan sistem pengendalian intern dan penerapan *Whistleblowing System* agar menjadi lebih baik dalam pencegahan *fraud* di era digital saat ini kepada seluruh pegawai dan menjaga sistem *Good Governance* serta penerapan akuntansi sektor publik untuk dipertahankan agar tidak terjadi *fraud* di era digital.

Daftar Pustaka

- [1] Kementerian Riset dan Teknologi Republik, I. (2018). Menristekdikti: Profesi Akuntan Harus Beradaptasi Dengan Revolusi Industri 4.0. Siaran Pers Kemenristekdikti.

- <https://www.brin.go.id/menristekdikti-profesi-akuntan-harus-beradaptasi-dengan-revolusi-industri-4-0/>
- [2] Komisi Pemberantasan Korupsi, K. (2022). Statistik TPK Berdasarkan Instansi. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>
- [3] Sihombing, E., Erlina, Rujiman, & Muda, I. (2019). The effect of forensic accounting, training, experience, work load and professional skeptic on auditors ability to detect of fraud. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 474–480
- [4] Biduri, S. (2018). Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik (M. T. M. Septi Budi Sartika (ed.); Pertama). Umsida Press.
- [5] Wardana, I. G. A. K., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- [6] Wijaya, R. E. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung).
- [7] Larasati, Y. S., Sadeli, D., & Surtikanti, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 3(2), 43–60.
- [8] Kristiani, D., & Hamidah. (2020). Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(2), 289–304
- [9] Maharani, & Mahmudah, H. (2021). Pengaruh Bystander Effect, Whistleblowing, Dan Perilaku Etis Terhadap Financial Statement Fraud. *Paradigma*, 18(2).
- [10] Rizqa, R. (2019). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan.
- [11] Wijaya, R. E. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung).
- [12] Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *Journal of Economics and Banking*, 1(1).
- [13] Wijayanti, P., Kartika, I., Kiryanto, K., Adiwijaya, Z. A., Shodiq, M. J., Mutoharoh, M., & Nashruah, N. U. (2020). Optimalisasi Peran Pendamping Desa terhadap Pencegahan Fraud Pemerintah Desa di Kabupaten Demak. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67>
- [14] Adiko, R. G., Astuty, W., & Hafisah. (2019). Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud PT. *Inalum*. 2(1).